

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa intensifikasi taktik greyzone Tiongkok terhadap Taiwan pada periode 2016–2020 merupakan bentuk strategi rasional dalam menghadapi sistem internasional yang anarkis. Ketiadaan lembaga supranasional menciptakan ruang ketidakpastian struktural yang mendorong Beijing bertindak antisipatif terhadap kemenangan Partai Demokratik Progresif (DPP) pimpinan Tsai Ing-wen dinilai berpotensi mengubah status quo Selat Taiwan secara fundamental. Melalui lensa realisme ofensif, Tiongkok bertindak cepat untuk memaksimalkan kekuatan relatifnya guna mencegah pergeseran kekuatan yang merugikan posisi pertahanannya.

Asumsi kedua mengenai kapabilitas militer ofensif termanifestasi secara konkret melalui peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok dari \$210,455 miliar USD pada 2017 menjadi \$257,973 Submiliar USD pada 2020. Modernisasi persenjataan yang masif ini mencakup operasionalisasi jet tempur Chengdu J-20, sistem rudal DF-26, serta penguatan PLAN hingga menjadi angkatan laut terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal. Dalam kerangka greyzone, akumulasi kekuatan material ini bukan sekadar latar belakang pasif melainkan instrumen aktif yang memberikan substansi pada setiap manuver di lapangan. Keberadaan kekuatan militer yang kredibel tersebut berfungsi sebagai penopang utama agar seluruh tekanan diplomatik, ekonomi, dan siber Tiongkok menghasilkan efek koersif yang nyata terhadap Taiwan.

Didorong oleh motif survival untuk mengamankan posisi sebagai hegemon regional, Tiongkok meluncurkan kampanye isolasi diplomatik secara sistematis dan terstruktur. Sepanjang 2016–2020, Beijing menggunakan strategi dengan memberikan investasi \$3,1 miliar USD ke Republik Dominika dan memblokir impor Lituania hingga Taiwan kehilangan tujuh sekutu penting. Pada ranah ekonomi, Tiongkok memanfaatkan interdependensi struktural dengan menerapkan restriksi pariwisata yang menurunkan kunjungan wisatawan daratan sebesar 16,2% pada tahun 2016. Dengan menyerap 31,8% dari total investasi luar negeri Taiwan

pada 2020 dan menargetkan perusahaan pro-kemerdekaan, Beijing memastikan ketergantungan finansial ini berfungsi membatasi ruang manuver geopolitik Taipei.

Asumsi mengenai ketidakpastian niat dan rasionalitas aktor termanifestasi secara kompleks melalui operasi siber serta kampanye disinformasi yang mengeksploitasi kerentanan struktural Taiwan. Memanfaatkan celah berupa tingkat penetrasi internet Taiwan yang mencapai 92%, Beijing meluncurkan sekitar 2.400 serangan disinformasi per hari pada periode 2018–2019. Operasi kognitif ini dieksekusi secara terhitung oleh kelompok 50 Cent Party, *content farm* lintas batas, dan diplomat Prajurit Serigala untuk menekan risiko pelacakan serta menghemat biaya operasional. Tiongkok mengimplementasikan Strategi Tiga Peperangan yang mencakup aspek opini publik, psikologis, dan hukum guna mendegradasi legitimasi pemerintahan Tsai sekaligus menanamkan narasi keniscayaan reunifikasi.

Secara konseptual, akumulasi tekanan pada berbagai dimensi ini membentuk perwujudan nyata dari konsep *shi* atau keuntungan strategis bagi PLA. Setiap manuver yang tidak ditentang, setiap mitra diplomatik yang direbut, dan setiap fragmentasi sosial yang diciptakan berkontribusi pada pergeseran kumulatif dalam distribusi kekuasaan. Sinergi dari lima asumsi dasar realisme ofensif membuktikan bahwa taktik greyzone merupakan instrumen paling rasional bagi Tiongkok untuk mengubah peta kekuatan demi keuntungannya. Dengan demikian, rentetan aktivitas sepanjang periode 2016–2020 ini merupakan satu kesatuan strategi ofensif terukur untuk mencapai dominasi hegemoni regional tanpa memicu konflik militer terbuka.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademik

Dari sisi akademis, penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, yakni fokus kajian yang dibatasi pada proses dan karakteristik penerapan taktik greyzone itu sendiri, bukan pada hasil atau dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penulis sangat mendorong peneliti selanjutnya untuk mengisi celah ini dengan mengevaluasi sejauh mana taktik greyzone Tiongkok selama periode 2016–2020 benar-benar berhasil mencapai tujuan strategisnya, apakah isolasi diplomatik yang dibangun efektif melemahkan posisi internasional Taiwan, apakah tekanan ekonomi berhasil mengubah kebijakan

pemerintahan Tsai, dan apakah kampanye disinformasi benar-benar berdampak signifikan terhadap orientasi politik masyarakat Taiwan. Pertanyaan-pertanyaan evaluatif semacam ini justru akan melengkapi penelitian yang sudah ada dan menghasilkan gambaran yang lebih utuh tentang efektivitas strategi greyzone dalam konteks hubungan lintas selat.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan mengkaji efektivitas taktik greyzone Tiongkok dalam jangka panjang, khususnya setelah periode 2020, di mana eskalasi aktivitas militer PLA di Zona Identifikasi Pertahanan Udara Taiwan mencapai intensitas yang semakin tinggi. Pendekatan komparatif dengan konteks greyzone di kawasan lain, seperti Laut Cina Selatan, konflik Rusia–Ukraina, atau ketegangan di Semenanjung Korea, akan memperkaya pemahaman tentang pola umum penggunaan strategi ini oleh negara-negara besar yang bersaing dalam sistem internasional kontemporer. Kajian komparatif semacam itu tidak hanya akan memperkuat validitas teoritis realisme ofensif, tetapi juga menghasilkan tipologi yang lebih presisi mengenai kondisi struktural yang mendorong atau menghambat penggunaan taktik greyzone.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam perspektif aktor non-negara dan masyarakat sipil dalam dinamika greyzone, termasuk peran media, komunitas diaspora, dan kelompok kepentingan bisnis dalam membentuk kerentanan maupun ketahanan negara sasaran. Penelitian mengenai respons domestik Taiwan terhadap tekanan greyzone, termasuk bagaimana dinamika partai politik, media, dan opini publik berinteraksi dengan kampanye pengaruh Beijing, juga merupakan wilayah kajian yang masih sangat terbuka dan menjanjikan kontribusi teoritis maupun kebijakan yang signifikan. Pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya literatur hubungan internasional sekaligus memberikan kontribusi kebijakan yang lebih aplikatif bagi negara-negara yang menghadapi tantangan serupa dalam dinamika kompetisi kekuatan besar di abad ke-21.

6.2.2 Saran Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Taiwan memperkuat respons asimetris terhadap tekanan greyzone Tiongkok melalui pendekatan yang komprehensif dan tidak semata-mata bertumpu pada kesiapan militer konvensional.

Mengingat taktik greyzone beroperasi di bawah ambang konflik bersenjata terbuka, Taiwan perlu mengembangkan doktrin pertahanan kognitif yang sistematis, termasuk penguatan literasi media masyarakat, pembentukan institusi verifikasi fakta yang independen, serta regulasi platform digital yang mampu memitigasi kampanye disinformasi dari pihak luar tanpa mengorbankan kebebasan informasi domestik. Kerentanan struktural Taiwan terhadap operasi pengaruh berbasis siber hanya dapat diatasi melalui sinergi antara kesiapan teknis dan ketahanan sosial-politik masyarakat.

Selain itu, Taiwan perlu mengakselerasi strategi diversifikasi ekonomi yang lebih konsisten guna mengurangi ketergantungan struktural terhadap pasar daratan, yang selama ini berfungsi sebagai instrumen koersi utama Beijing. New Southbound Policy yang telah digagas pemerintahan Tsai perlu diperdalam dengan insentif investasi yang lebih konkret, pembangunan jaringan rantai pasok alternatif, serta penguatan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara-negara mitra di kawasan Indo-Pasifik. Semakin terdiversifikasinya mitra ekonomi Taiwan, semakin terbatas pula daya ungkit koersif yang dapat dimanfaatkan Beijing melalui instrumen perdagangan dan pariwisata. Pada saat yang sama, komitmen negara-negara mitra internasional, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara anggota Indo-Pacific Economic Framework, perlu dikonsolidasikan melalui perjanjian yang lebih mengikat secara hukum guna memperkuat posisi tawar Taiwan di hadapan tekanan diplomatik Tiongkok.

Bagi komunitas internasional, penelitian ini merekomendasikan pembentukan mekanisme respons kolektif yang lebih tegas terhadap aktivitas greyzone yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Ambiguitas strategis yang selama ini menjadi pilar kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Selat Taiwan terbukti memberikan ruang eksploitasi bagi Tiongkok untuk terus memperluas tekanannya. Oleh karena itu, diperlukan sinyal yang lebih konsisten dan terkoordinasi dari komunitas internasional bahwa tindakan-tindakan koersif di bawah ambang konflik bersenjata, termasuk kampanye disinformasi, isolasi diplomatik, dan pemerasan ekonomi, tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Normalisasi respons kolektif terhadap taktik greyzone akan secara bertahap mengurangi insentif struktural bagi negara-negara yang berniat menggunakannya.